

**PENGUATAN LEMBAGA EKONOMI LOKAL DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI PADA  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
MASLAHAH MURSALAH LIL UMMAH DI PASURUAN**

*(STRENGTHENING OF LOCAL ECONOMIC INSTITUTIONS IN  
POVERTY ASSESSMENT MEASURES: STUDY IN MICRO FINANCIAL  
INSTITUTIONS BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASLAHAH  
MURSALAH LIL UMMAH IN PASURUAN)*

**Rustam Efendi**

**Abstrak**

---

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini secara umum adalah bagaimana penguatan lembaga ekonomi lokal dijalankan oleh BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada upaya penanggulangan kemiskinan, karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai; 1). strategi pengelolaan dan pengembangan LKM-BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* 2). peran BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang bermuara pada upaya penanggulangan kemiskinan 3). peran pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya penguatan lembaga ekonomi lokal, termasuk BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah*. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Baitul Maal wat tamwil *Maslahah Mursalah Lil Ummah*. Proses pengumpulan data dilakukan baik secara primer maupun sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, internet dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; 1). terjadi perkembangan dan kemajuan usaha BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* Sidogiri secara efektif sebagai implikasi dari penerapan strategi pengelolaan BMT yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen syariah dan kekuatan jaringan kerja (*net work*) alumni Pondok Pesantren Sidogiri serta jalinan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan dan dunia usaha lainnya, 2). keberadaan BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* Sidogiri dalam menjalankan perannya memberikan dampak bagi perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup anggota/nasabah serta masyarakat desa Sidogiri dan sekitarnya melalui pemberian bantuan modal usaha, baik yang berasal dari pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). maupun lewat dana zakat produktif yang berasal dari modal dan pendapatan BMT, 3). peran pemerintah dalam penguatan lembaga ekonomi lokal, termasuk bagi BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* sudah dilakukan melalui; bantuan modal usaha, pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis namun belum berjalan secara optimal karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya, sementara dalam bentuk dukungan regulasi masih bersifat umum berupa Peraturan daerah tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, secara spesifik dan lebih teknis terhadap penguatan lembaga ekonomi lokal belum diatur

---

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, Pasuruan, Masalah Lil Ummah

**Abstract**

---

*The problem that will be studied in this research generally is how strengthening local economic institution run by BMT Masalah Mursalah Lil Ummah in economic empowerment of society which lead to effort of poverty eradication, hence this research aim to to describe about; 1). Management and development strategy of LKM-BMT Masalah Mursalah Lil Ummah 2). The role of BMT Masalah Mursalah Lil Ummah in empowering community economic effort that leads to poverty reduction efforts 3). The role of Pasuruan Regency government in the effort of strengthening local economic institutions, including BMT Masalah Mursalah Lil Ummah. This research was conducted in Sidogiri Village Kecamatan Kraton Pasuruan Regency, using descriptive qualitative research type with case study on Baitul Maal wat tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah. The process of collecting data is done both in primary and secondary obtained through in-depth interviews, documentation, internet and observation. The results showed that; 1). There is a development and progress of the business BMT Masalah Mursalah Lil Ummah Sidogiri effectively as an implication of the implementation of BMT management strategy that is run with the principles of sharia management and the strength of the network (net work) alumni of Pondok Pesantren Sidogiri and the partnership with financial institutions and the world Other business, 2). The existence of BMT Masalah Mursalah Lil Ummah Sidogiri in carrying out its role gives impact to the improvement of economy and improvement of standard of living of member / client and society of Sidogiri and its surrounding villages through the provision of business capital aid, either from financing of profit sharing (mudharaba). Or through productive zakat funds derived from BMT's capital and income, 3). The role of government in strengthening local economic institutions, including BMT Masalah Mursalah Lil Ummah has been done through; Business capital assistance, coaching, training and technical guidance but have not run optimally due to limited funds and other resources, while in the form of regulatory support is still general in the form of local regulations on the establishment of Village Community Institutions, specifically and more technically to strengthen institutions The local economy has not been regulated.*

---

**Keywords:** *Economic Empowerment of the Poor, Pasuruan, Masalah Lil Ummah*

## LATAR BELAKANG

Secara umum kondisi kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena sosial yang krusial dan bersifat multidimensional karena hampir mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, dimana keberadaan masyarakat miskin tidak hanya sebatas ditentukan oleh ukuran pendapatan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak politik, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, disusul konflik sosial di beberapa daerah serta berbagai bencana alam yang sampai saat ini sering melanda. Kesemuanya membawa dampak melemahnya kegiatan ekonomi, kurang optimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, kurang memadainya prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sertakurangnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam pemberian pelayanan, yang sekaligus berimplikasi pada masih tingginya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan Data BPS hingga Tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 28,59 juta orang (11,22 %). Berkenaan dengan penyebab timbulnya kemiskinan inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut dengan *deprivation trap* atau jebakan kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor ketidakberuntungan, dan kerentanan serta ketidakberdayaan merupakan faktor yang sering menyebabkan keluarga miskin menjadi lebih miskin.

Melalui berbagai program, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk senantiasa berusaha melakukan berbagai upaya yang bermuaran pada penanggulangan kemiskinan, namun diakui hasil dari upaya dimaksud belum dapat sepenuhnya menjadi solusi terbaik dalam menekan jumlah angka kemiskinan. Hal ini disebabkan upaya pemerintah selama ini melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan cenderung tidak terintegrasi, melainkan lebih berorientasi pada pengembangan proyek-proyek dan menonjolkan penanganannya secara sektoral, sehingga implementasi dari kebijakan/program tidak dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan, justru dalam pelaksanaannya banyak mengalami bias. Dalam hal ini Winasa (2006) menyebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan berbagai program pengentasan masyarakat miskin, yakni; 1) kebijakan kemiskinan cenderung hanya bersifat/berupa kegiatan proyek, 2) kesinambungan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak sampai membuahkan hasil. Kebijakan tersebut sering sekali menghilang bersamaan dengan habisnya kegiatan proyek, 3) bias birokrasi dan lemahnya posisi penduduk miskin, 4) kecenderungan sentralisasi dalam penggunaan dana, 5) penentuan kelompok sasaran program masih sangat dipengaruhi oleh *vested interest* dari aparat pemerintah, 6) pemilihan usaha yang dikembangkan oleh kelompok cenderung hanya terbatas pada jenis usaha yang dikenali tanpa melihat prospek usaha dan pasar serta 7) peran pendampingan pokmas yang belum maksimal.

Disamping itu, adanya krisis moral dan lemahnya supremasi hukum juga ikut memberi andil suburnya praktek KKN yang sistemik dan kronis dari para oknum aparat dan pengusaha yang pada gilirannya membawa kebangkrutan negara dan sekaligus menjadi penyebab belum pulihnya perekonomian nasional, dan kondisi ini cukup mewarnai wajah birokrasi kita saat ini. Akibatnya, kelompok rakyat kecil semakin tidak menikmati hasil pembangunan dan justru sebaliknya ikut menanggung beban akibat perilaku individual atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut. Berikut adanya dampak globalisasi tambah melengkapi ketidakadilan dalam ekonomi, marjinalisasi dan eksplosif sosial. Globalisasi membuat masyarakat miskin rentan terhadap gejolak pasar dunia karena sebagian besar manfaat globalisasi hanya dapat dinikmati oleh pelaku usaha dan negara yang lebih maju dan kuat, sementara masyarakat miskin tidak mampu bersaing dengan kompetisi tersebut. Data *UNDP Human Development Report* tahun 1999 menyebutkan bahwa rakyat di 5 negara terkaya didunia menikmati 82 % dari peningkatan ekspor dan 68 % dari *foreign direct investment*, sebaliknya rakyat di 5 negara termiskin di dunia menikmati hanya sekitar 1 % terhadap kedua komponen tersebut.

Sejalan dengan strategi nasional penanggulangan kemiskinan, yang salah satu kebijakannya menitik beratkan pada optimalisasi sektor ekonomi mikro, maka secara operasionalnya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi mikro (lokal) menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dimana daerah dengan azas desentralisasi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang mengamatkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat lokal diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengembangkan dan menggali potensi daerah seoptimal mungkin, dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah menuju kemandiriannya. Dalam konteks ini, kemampuan kepala daerah, termasuk seluruh jajaran birokrasinya dan DPRD dalam menuangkan karakter daerah itu kedalam kebijakan strategis pembangunan ekonomi daerah yang solid dan kohesif akan menjadi modal awal penting untuk membangkitkan potensi daerah dan partisipasi politik aktif dari rakyat daerah.

Berangkat dari uraian diatas maka penguatan lembaga ekonomi lokal menjadi penting untuk dikembangkan dan diberdayakan, dan salah satu lembaga ekonomi lokal yang cukup berhasil dan besar andilnya dalam upaya memperbaiki ekonomi umat adalah Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil, disingkat LKM-BMT. Dilatar belakangi oleh prihal ini, maka penulis memfokuskan kajian ini pada "Penguatan lembaga ekonomi lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan", dimana lokus kajiannya dilakukan pada LKM-BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah di Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Permasalahan yang akan dikaji secara umum adalah bagaimana penguatan lembaga ekonomi lokal dijalankan oleh BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada upaya penanggulangan kemiskinan karena itu tujuan penelitian/kajian ini adalah untuk mendiskripsikan mengenai ; 1) strategi pengelolaan dan pengembangan LKM-BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah, 2) peran BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang bermuara pada upaya penanggulangan kemiskinan serta 3) peran/kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya penguatan lembaga ekonomi lokal, termasuk BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Faktor Penyebab Kemiskinan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, karena terjadinya melibatkan berbagai aspek secara mata rantai yang saling mempengaruhi antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Menurut Soetrisno (2001) bahwa faktor penyebab orang menjadi miskin, antara lain ; 1) perbedaan akses ekonomi yang dimiliki; 2) ketidak beruntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin; 3) ketimpangan distribusi; 4) pembangunan analog sebagai ideologi; 5) strategi pembangunan dan industrialisasi, dan 6) intervensi Pemerintah. Selanjutnya Bakhit (2001) berpendapat; kemiskinan merupakan kondisi yang terjadi karena kerangka kerja pemerintah dan hukum yang tidak memadai, keadaan ini terutama terjadi di daerah perkotaan. Kemiskinan perkotaan tidak memiliki akses yang bebas terhadap sumber daya seperti tanah, air dan energi.

Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling mempengaruhi antara satu keadaan dengan keadaan yang lain, karenanya kondisi miskin yang diderita/dialami oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dapat dikatakan sebagai sebuah mata rantai dari sejumlah faktor-faktor penyebabnya yang merupakan perangkap kemiskinan itu sendiri. Dalam hal ini, melalui berbagai penelitiannya menyimpulkan; inti permasalahan kemiskinan terletak pada apa yang disebut dengan jebakan penjarahan/kekurangan (*deprivation trap*). Lebih lanjut ia jelaskan perangkap kemiskinan yang mewarnai dan mengkondisikan ketidak beruntungan dimaksud disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi; 1) kemiskinan itu sendiri, 2) kelemahan fisik, 3) isolasi, 4) kerentanan dan 5) ketidakberdayaan.

### Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan menuntut strategi dan kebijakan yang bukan hanya dilaksanakan dan diorientasikan pada bantuan pemenuhan kebutuhan dan penyediaan sarana infra struktur semata, melainkan harus lebih ditujukan dan dipusatkan pada pembangunan manusianya (masyarakat), karena disadari posisi sumber daya manusia sangat strategis dan memegang peranan penting, dimana ia disamping sebagai objek yang menjadi sasaran kebijakan juga sekaligus sebagai aktor yang melakoni upaya penanggungan kemiskinan itu sendiri. Terdapat dua pendekatan dalam pembangunan yakni top-down dan bottom-up.

Pendekatan *top-down*; merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah sementara masyarakat hanyalah sebagai objek pembangunan, sementara pendekatan *bottom-up*; pendekatan yang memosisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan, sehingga masyarakat terlibat sejak perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini selanjutnya disebut sebagai *people centered development*. Sejalan dengan hal ini Sulistiyani (2004) mengatakan pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang sangat ideal dalam pembangunan, sebab memperhatikan inisiatif, kreativitas, dan mengakomodasi kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam konteks otonomi daerah, upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis menurut Hermana (2006) dapat dirumuskan dalam satu kalimat "*berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka sendiri*", ini berarti pihak luar harus meroposisi

peran mereka dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Lebih lanjut, desentralisasi, apapun bentuknya manifestasinya tidak akan bermakna dan tidak akan dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat miskin, jika tidak disertai dengan partisipasi pada tingkat lokal, sebab pada hakikatnya desentralisasi dan partisipasi itu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Atas padangan itu, untuk mencapai hal tersebut Widianingsih (2006) mengemukakan pentingnya empat pilar pokok yang harus dijadikan dasar, yang meliputi; 1) menciptakan peluang, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pengembangan kapasitas, dan 4) perlindungan sosial. Dalam implementasinya menurut beliau; Ke-empat pilar tersebut harus didukung oleh mekanisme perencanaan, pemograman dan penganggaran yang terintegrasi sehingga tujuan strategi pengentasan kemiskinan tetap berada pada koridor untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menekan biaya, karenanya yang dibutuhkan pada keadaan ini adalah manajemen pemerintahan yang didasarkan pada Good Governance.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan kata kunci untuk mencapai kemandirian, dan dengan kemandirian seseorang atau masyarakat dapat terentaskan dari kemiskinan. Dengan demikian pemberdayaan menjadi penentu dari upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Pranaka (1996) pemberdayaan mengandung dua arti. Pertama diartikan sebagai *to give power or outhority* yang bermakna memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan pengertian kedua *to give ability or enable* yang dimaknai pemberian kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah aktivitas yang berorientasi pada upaya membangun kemampuan dan kemandirian seseorang atau pengalihan kekuatan kepada pihak yang belum berdaya agar ia dapat melakukan sesuatu, khususnya kelompok rentan dan kelompok lemah sehingga pada gilirannya mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang dapat menjadikan mereka mandiri dalam keberadaan sosial dan ekonomi serta dapat memenuhi berbagai keperluannya secara lebih baik. Dalam hal ini Soeharto (2005) mengatakan bahwa tuntutan kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan dalam, 1) memenuhi keperluan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Senada dengan hal ini Jamasy (2004) menyatakan bahwa konsekwensi dan tanggung jawab utama program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah terwujudnya masyarakat yang mempunyai kekuatan. Lebih lanjut ia menjelaskan; kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual (meningkatnya sumber daya manusia), dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Demikian pula Tjokrowinoto (2004) mengungkapkan cakupan pembangunan sumber daya manusia meliputi pendidikan, dan latihan, kesehatan gizi, penurunan fertilitas, dan pengembangan enterpreneurial yang kesemuanya bermuara pada peningkatan produktifitas manusia.

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan baik dalam tingkat individu, organisasi maupun pada level masyarakat harus dibangun dengan terciptanya kondisi yang memenuhi kriteria tangga pemberdayaan yang berstruktur dari tingkat *choice* (ada pilihan), *participation* (partisipasi) sampai pada tingkat *control* (kendali/pengawasan) terhadap pranata sosial-ekonomi dan politik. Senada dengan hal ini Soeharto, (2005) kembali mengatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut sedapat mungkin harus terbangun pada empat dimensi kekuasaan yaitu (1) kekuasaan

didalam (power within) meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah, (2) kekuasaan untuk (power to) meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses, (3) kekuasaan atas (power over) perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro, serta (4) kekuasaan dengan (power wit) meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro”.

### **Penguatan Lembaga Ekonomi Lokal**

Menurut Yustika (2006) pendefinisian kelembagaan dalam ekonomi dapat dipilah dalam dua klasifikasi, yakni; *Pertama*, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesaian pola interaksi antar pelaku ekonomi, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan transaksi. *Kedua*, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antar pelakunya. Sejalan dengan pendapat tersebut Mubyarto (2005) mendefinisikan pengertian kelembagaan ekonomi lebih spesifik sebagai berikut kelembagaan ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang percaya adanya peran besar lembaga-lembaga dalam kinerja ekonomi suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang buat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau dapat dipaksakan pematuhannya.

Pentingnya keberadaan kelembagaan ekonomi di masyarakat karena pada kenyataannya dalam aktivitas keseharian, masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi senantiasa membutuhkan kehadiran/ peran lembaga ini, *dalam* Rintuh dan Miari (2005) mengemukakan, pentingnya kelembagaan ekonomi karena; *pertama*; banyak masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga seperti pelayanan perkreditan, pembasmian hama, penyebaran inovasi pertanian dan lain-lain, disamping berperan sebagai lembaga besar dalam masyarakat, *kedua*; dapat memberi kelanggengan pada masyarakat desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya, *ketiga*; dapat mengorganisasi masyarakat desa untuk dapat bersaing dengan pihak luar.

Dalam konteks kemiskinan keberadaan kekuatan ekonomi seseorang sangat menentukan ia mampu membebaskan diri dari lilitan kemiskinan atau tetap berada dalam kondisi tidak berdaya dengan keadaan miskin yang ia derita. Orang miskin akan selalu berada dalam keadaan miskin bila ia secara ekonomi tidak mampu memberikan akses terhadap pemenuhan kebutuhannya, akibat tidak seimbang antara pendapatan dan nominal keperluan yang ia perlukan, sebaliknya mereka akan dengan mudah untuk dapat keluar dari kondisi miskin serta dapat meningkatkan taraf hidupnya lebih baik jika mereka mempunyai kekuatan ekonomi secara seimbang bahkan surplus. Untuk itu menurut Rintuh dan Miari (2004) penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh dengan upaya penguatan person atau kelompok miskin melalui peningkatan sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha serta penguatan kelembagaan kelompok ekonomi rakyat.

Terhadap hal ini maka yang penting dibangun adalah keberfungsian kelembagaan ekonomi secara utuh melalui optimalisasi/penguatan peran dan fungsinya didalam masyarakat. Ukuran optimalnya kelembagaan tersebut sangat ditentukan oleh keterlibatan peran secara sinergis dari semua aktor secara stakeholder. Kelembagaan ekonomi lokal yang dimaksud adalah kemitraan lembaga pemerintah, pihak swasta serta sektor lembaga swadaya berupa organisasi yang dibentuk untuk kepentingan bersama, diantaranya adalah Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal wat Tamwil (LKM-BMT).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian dilakukan di Baitul Maal wat Tanwil

Masalah Mursalah Lil Ummah di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci secara purposive yang meliputi: *jajaran pemerintah*; Kasubid. UEM BAPEMAS, Kasubdin Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM, Kasi Pembangunan dan Ekonomi Kec. Kraton dan Kepala Desa Sidogiri. *Unsur BMT MMU*; Ketua dan Wakil Pengurus BMT MMU, Manager dan KTU serta pengelola unit cabang dan anggota/nasabah BMT MMU. *Lembaga Zakat*; Sekretaris Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sidogiri. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992) dengan memperhatikan prinsip metodologis berupa; 1) reduksi data, 2) penyajian data serta 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BMT MMU

Pengelolaan usaha BMT MMU dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen syariah yang implikasinya tergambar dan terbentuk pada sikap dan tindakan para pengelola berupa sikap jujur (*siddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), profesional (*fathonah*) dan komunikatif (*tabligh*). Dalam hal ini Ridwan (2004) mengatakan; amanah merupakan kepercayaan yang sangat mahal harganya. Bisnis disektor keuangan merupakan bisnis kepercayaan, dan karena kepercayaanlah orang akhirnya mau menyimpan uangnya. Oleh karena itu Islam mengharuskan menunaikan amanah ini dengan baik.

Pada tataran wewenang dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang ada, tidak ada rangkap jabatan sehingga tidak terjadi intervensi/pengambil alihan wewenang atau tumpang tindihnya peran secara kontradiktif. Sejalan dengan hal tersebut Ridwan (2004) mengatakan Struktur dalam oraganisasi menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Lebih lanjut Winardi (2004) mengatakan; sebuah organisasi dipandang sebagai sebuah sistim, ia merupakan suatu kesatuan dengan sejumlah komponen yang saling berinterelasi, dimana perimbangan dan koordinasinya merupakan kunci bagi upaya memaksimalkan kinerja serta mengoptimalkan efesiensi sebagai keseluruhan

Demikian pula dalam hal optimalisasi kinerja dijalankan dengan tertib jam kerja, penegakan disiplin, pemberian sanksi sampai pada pemberian gaji yang memadai sebagai bentuk motivasi kerja. Dan suasana kerja dibangun selalu bernuansa kebersamaan, keterbukaan, dan komunikatif dalam ikatan kemanusiaan dan persaudaraan. Dalam kaitan ini Winardi (2004) memandang seni manajemen sebagai upaya untuk menciptakan hubungan para manajer dan para karyawannya. Sementara pada tataran pengembangan BMT MMU dilakukan dengan pendekatan jaringan alumni Sidogiri melalui institusi madrasah-madrasah yang mempunyai ciri khas Sidogiri. Dan untuk rekrutmen anggota/nasabah dilakukan dengan aktivitas sosialisasi melalui jaringan kerja madrasah, da'wah melalui pengajian di masjid dan majelis ta'lim termasuk lewat pertemuan-pertemuan alumni yang dibuat khusus untuk itu.

Disamping itu dalam rangka lebih mengoptimalkan usahanya, BMT MMU membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga BUMN, Swasta dan koperasi sementara dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan pengelolanya BMT MMU menjalin kerjasama dengan institusi perguruan tinggi dan lembaga profesional. Senada dengan hal itu Jatmiko (2004) mengatakan; kemampuan organisasi memadukan sumberdaya eksternal dengan sumberdaya internal dalam penciptaan produk dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen stratejik.

### Peran BMT MMU dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang bermuara pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat BMT MMU telah melakukan pemberian bantuan modal usaha kepada anggota/nasabah dan masyarakat miskin pada umumnya, baik melalui dana zakat

produktif maupun lewat pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dengan mekanisme dan prosedur yang mudah sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk pula kemudahan yang diberikan dalam memanfaatkan produk-produknya tabungan BMT yang difasilitasi dengan mendatangi langsung rumah-rumah penduduk (*sistim jemput bola*). Berkenaan dengan hal tersebut Widyaningrum (2000) melakukan penelitian dengan topik Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil menyimpulkan; Bahwa peran BMT membawa dampak positif bagi kelompok usaha kecil dan rumah tangga. BMT telah mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh anggotanya, termasuk berhasil dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa finansial, terutama sebagai sumber modal bagi kelompok usaha kecil yang tidak dapat mengakses sumber modal dari lembaga keuangan perbankan formal/bank umum.

Di samping itu untuk meningkatkan keterampilan anggota/nasabah dalam peneglolaan modal usaha, BMT MMU juga melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok pelaku usaha melalui pendekatan pendampingan. Aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh BMT menurut Azis (2004) bertujuan untuk menumbuhkan pengusaha mikro dan kecil yang tangguh dan profesional dalam rangka mengendalikan kemiskinan. Dalam kaitannya dengan memperluas fasilitas keuangan, BMT MMU mewujudkannya dengan diversifikasi usaha. Sejak November 2013 BMT MMU berganti nama menjadi koperasi BMT Masalah Pasuruan dan kemudian berganti lagi menjadi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Unit usahanya terus berkembang dari awal berjumlah 14 unit usaha pada tahun 2006 berkembang menjadi 86 unit pada tahun 2009 dan saat ini, juni 2017 sudah memiliki 242 unit pelayanan yang tersebar di 10 propinsi di Indonesia hingga akhirnya menduduki peringkat puncak The Best Islamic Mikro Finance. Keberhasilan ini menurut Bakhri (2015) merupakan perwujudan visi khidmat lil mah'had wa khidmah lil ummah (*pengabdian pada pesantren dan kepada umat*), Karena itu sebagai bentuk pengabdian kepada umat BMT UGT Sidogiri bekerjasama dengan lembaga amal zakat, infak, sadaqah dan wakaf (Laziswa) Ponpes Sidogiri khusus dalam penanganan kaum fakir miskin melalui program Kucuran Subsidi Fakir (*Kusin*), program Kucuran Dana Usaha (*Kuda*), serta program Pendidikan dan Pelatihan Tepat Guna (*Pelana*), sementara upaya mengurangi eksploitasi orang miskin oleh para rentenir dan memperluas kesempatan berusaha, BMT UGT mencarikan solusinya dengan program pembiayaan mudharabah dan murabahah.

Pada tataran penguatan ruhiya; BMT UGT melakukan pendampingannya dalam bentuk pembinaan yang diorientasikan pada kegiatan penanaman nilai-nilai agama, moralitas, motivasi, budayai dan peningkatan percaya diri dalam bekerja, Sedangkan untuk pembinaan usaha diarahkan pada bimbingan yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan usaha. Senada dengan upaya ini, Hikmat (2004) berkomentar pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

### **Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Upaya Penguatan Lembaga Ekonomi Lokal/ BMT MMU**

Dalam Rencana strategis kabupaten Pasuruan tahun 2008-2013 disebutkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan penguatan lembaga ekonomi lokal dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa serta meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam kaitan ini maka prioritas pembangunan diarahkan pada Penanggulangan kemiskinan yang meliputi; 1) pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan program maupun non program serta 2) pembangunan sektor perkoperasian dan UKM melalui; a) perkuatan lembaga Koperasi, b) peningkatan jumlah anggota Koperasi dan, c) perkuatan permodalan UKM. Dalam hal ini Rintuh dan Miar (2004) mengatakan penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh dengan upaya penguatan person atau kelompok miskin melalui peningkatan sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha serta penguatan kelembagaan kelompok ekonomi rakyat.

Dengan demikian dapat dikatakan seluruh rangkaian konsep yang telah dirumuskan mulai dari renstra, strategi dan arah kebijakan sampai pada program kerja secara teknis yang terdistribusi

pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan, termasuk lewat penguatan lembaga ekonomi lokal sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam bentuk; bantuan modal usaha dan pembinaan, kendatipun belum secara optimal karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya, demikian pula dukungan regulasi juga sudah dilakukan meskipun belum secara khusus diatur. Dan semua usaha itu dilakukan senantiasa berorientasi pada upaya terbentuknya masyarakat yang “mandiri”. Sesuai dengan Visi pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu; terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, mandiri, dinamis dan agamis. Memperkuat harapan dari visi ini Hikmat (2004) mengatakan; pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai melalui pengetahuan dan kemandirian serta ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama;** strategi pengelolaan dan pengembangan Baitu Maal wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT MMU) Sidogiri dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan syariah. Aktivitas dalam pengelolaan usaha dijalankan dengan menerapkan fungsi dasar manajemen dan dibangun dengan jalinan kebersamaan, kekompakan, keterbukaan serta saling menghargai dan percaya melalui interaksi yang komunikatif dan terhadap optimalisasi kerja staf dan karyawan, BMT MMU menerapkan tertib administrasi, tertib jam kerja/aturan termasuk tertib dalam pemberian gaji sebagai bentuk motivasi kerja. Sementara dalam pengembangan/diversifikasi usaha BMT MMU; dilakukan dengan pendekatan secara internal melalui jaringan kerja alumni pondok pesantren Sidogiri dan lewat sosialisasi sedangkan secara eksternal dilakukan melalui hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai visi yang sama. Dampak dari penerapan serangkaian strategi tersebut berimplikasi efektif dan produktif bagi perkembangan dan kemajuan usaha BMT MMU secara pesat. **Kedua;** Peran Baitul Maal wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT MMU) dalam pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang bermuara pada upaya Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha, baik yang berasal dari pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). maupun lewat dana zakat produktif melalui kerjasama dengan Lembaga amil, zakat, infaq, sadakah, dan wakaf (Laziswa) Sidogiri. Dari peran dimaksud membawa dampak positif bagi perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup anggota/nasabah serta masyarakat Desa Sidogiri dan sekitarnya. **Ketiga;** Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya penguatan lembaga ekonomi lokal telah dilakukan melalui; a). pemberian bantuan modal usaha, b). Pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis, namun diakui keduanya belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya serta, c). dukungan aturan normatif, namun masih bersifat umum berupa Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, secara spesifik dan lebih teknis tentang penguatan lembaga ekonomi lokal belum diatur.

## RUJUKAN

- Azis, A. 2004. *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pokusma dan BMT*, Edisi Pertama. Pinbuk Press. Jakarta.
- Bakhri, M.S. 2015. *Sukses Koperasi Syariah Sidogiri. The Best Islamic Micro Finance*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama.
- Bakhit, I. 2001. *Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Frederik Ruma. Jakarta: YAKOMA-PGI.
- Hermana, D. 2006. Kebijakan Publik dan Problema Kemiskinan di Indonesia. Makalah pada Workshop Transformasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Bisnis dalam Upaya Memecahkan Problem Kemiskinan di Indonesia. Bandung. 29 Agustus.
- Hikmat, R. H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Jatmiko, RD. 2004. *Manajemen Strategik*. Malang: UMM Press.
- Miles & Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia

- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 2005. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kanca Globalisasi*. Bogor: Sains Sajogyo Inside.
- Pranaka, A. M. W. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rintuh, C. & Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Ridwan, M. 2004. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Soeharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Soetrisno, R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widianingsih, I. 2006. Transformasi Kebijakan Publik dalam Upaya Memecahkan Problem Kemiskinan di Indonesia. Makalah pada Workshop Transformasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Bisnis dalam Upaya Memecahkan Problem Kemiskinan di Indonesia. Bandung. 29 Agustus.
- Winasa I. G. 2006. Strategi Kabupaten Jembrana Mengurangi Kemiskinan. Makalah pada Workshop Transformasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Bisnis dalam Upaya Memecahkan Problem Kemiskinan Di Indonesia. Bandung. 29 Agustus.
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Widyaningrum. 2000. Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil. Tesis Pasca Sarjana. Malang: Universitas Brawijaya.
- Yustika, A. E. 2006. *Ekonomi Kelembagaan, Defenisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayu Media.

Rustam Efendi, PhD.  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tadulako,  
Palu, Sulawesi Tengah,  
Indonesia